

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
KORBAN KECELAKAAN BUS TRANS METRO DELI PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH**

**Iqbal Lamkaruna Tijue<sup>1</sup>, Fatimahzahara<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: [Iqballamkaruna1@uinsu.ac.id](mailto:Iqballamkaruna1@uinsu.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: [fatimahzahara@uinsu.ac.id](mailto:fatimahzahara@uinsu.ac.id)

**Abstract**

*This research aims to examine the legal responsibility of the local government towards victims of the Deli Trans Metro Bus accident from the perspective of the masalah murlah principle. The main focus of this research is to analyze various aspects related to local government responsibilities, including policies for handling victims and the application of the masalah murlah principle in public policy. This type of research is normative empirical with a case approach and a statutory approach. The research results show that the number of accidents involving Trans Metro Deli buses in the last year was two. Based on masalah murrasa, government responsibility includes greater assistance for victims, up to providing compensation by considering greater benefits for victims. However, in reality, the regional government until the time this research was conducted had not fulfilled this responsibility optimally. This research recommends that local governments need to correct city transportation policies for the benefit of the community.*

**Keywords:** *Maslahah Mursalah, Legal Responsibility, Local Government, Transportation Accidents, Trans Metro Deli*

**1. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pertumbuhan urbanisasi yang pesat dan perkembangan transportasi publik di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Medan telah menjadikan sistem transportasi umum sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021) Salah satu bentuk transportasi umum yang beroperasi di kota Medan adalah Bus Trans Metro Deli. Sistem transportasi diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemacetan, mengurangi polusi udara, dan memberikan alternatif yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Namun, meningkatnya penggunaan transportasi umum terdapat risiko kecelakaan yang semakin tinggi. Kasus kecelakaan Bus Trans Metro Deli menjadi perhatian khusus karena dampaknya signifikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan penumpang.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam sektor transportasi, dapat diperkuat melalui penerapan prinsip masalah mursalah. Sebagai metode istinbat hukum dalam Islam, prinsip ini memberikan ruang bagi pengambilan keputusan yang berlandaskan kemanfaatan bersama, tanpa harus bergantung pada aturan yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Pendekatan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, seperti meningkatkan keamanan transportasi umum dan memberikan penanganan yang layak bagi korban kecelakaan. Penerapan masalah mursalah tidak hanya menghadirkan solusi praktis, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Syarat-syarat *masalah mursalah* menjadi acuan penting dalam menentukan kebijakan yang relevan dan adil dalam kasus ini (Mukhsin, 2017). Syarat pertama, yaitu kemaslahatan harus terkait dengan kebutuhan pokok (*dharuriyah*), terlihat pada fokus pemerintah untuk melindungi nyawa dan kesehatan penumpang sebagai prioritas utama. Syarat kedua, kemaslahatan harus bersifat pasti (*qath'iy*), tercermin dari tindakan yang terbukti secara nyata memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat luas, seperti peningkatan regulasi keselamatan transportasi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Syarat ketiga, kemaslahatan harus bersifat umum (*'am*), diterapkan dalam kebijakan yang inklusif dan non-diskriminatif, sehingga manfaatnya dirasakan oleh semua kalangan. Terakhir, kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanganan kecelakaan transportasi mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadi inti syariat.

Data kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, menunjukkan tingginya angka kecelakaan yang melibatkan transportasi publik. Pada tahun 2022, tercatat 1.665 kasus kecelakaan di Medan, yang menyebabkan 211 korban meninggal dunia dan 752 luka berat. Realitas ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya menyediakan sarana transportasi yang memadai, tetapi juga mengantisipasi risiko yang timbul melalui kebijakan mitigasi kecelakaan dan pemberian kompensasi yang adil. Selain itu, kerugian materi yang mencapai miliaran rupiah mempertegas pentingnya pengelolaan transportasi yang mengutamakan keselamatan (Polda Sumatera Utara, 2023)

Prinsip masalah mursalah dapat menjadi pijakan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang mengedepankan kemanfaatan bersama dan kepentingan masyarakat. Dalam situasi seperti kecelakaan transportasi, pendekatan ini menuntut setiap langkah penanganan, mulai dari evakuasi hingga rehabilitasi, dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan para korban. Dengan prinsip ini, kebijakan yang diambil diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hukum ekonomi syariah, tanggung jawab pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan transportasi umum memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan perspektif hukum konvensional. Prinsip masalah mursalah yang merupakan salah satu dasar dalam hukum Islam, menekankan pada upaya untuk mencapai kemaslahatan umum dan mencegah kerugian bagi masyarakat (Wajdi, 2021). Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam penanganan korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli menjadi sangat relevan dan penting untuk dianalisis.

Masalah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kebijakan atau tindakan yang diambil untuk kemaslahatan umum, meskipun tidak memiliki dasar yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis (Hadi, 2019). Prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kecelakaan transportasi umum, penerapan prinsip masalah mursalah dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari tanggung jawab hukum pemerintah, kebijakan penanganan korban, hingga mekanisme kompensasi.

Pemerintah daerah yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara, memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam memastikan

keselamatan dan kesejahteraan penumpang Bus Trans Metro Deli. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan infrastruktur yang aman, regulasi yang ketat, hingga penanganan langsung terhadap korban kecelakaan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, prinsip masalah mursalah dapat menjadi landasan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil membawa manfaat maksimal bagi masyarakat dan mencegah kerugian yang lebih besar. Penanganan korban kecelakaan transportasi umum oleh pemerintah daerah mencakup berbagai tahapan, mulai dari evakuasi dan pertolongan pertama, penyediaan layanan medis dan psikologis, hingga pemberian kompensasi kepada korban dan keluarganya.

Setiap tahapan ini harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip masalah mursalah, sehingga manfaat yang diperoleh korban dan masyarakat lebih besar daripada kerugiannya (Sultan, 2019). Kebijakan pemerintah daerah dalam menangani korban kecelakaan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal seperti regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti tekanan dari masyarakat, media, dan lembaga non-pemerintah, semuanya berperan dalam membentuk kebijakan tersebut. (Ambarwati, 2021) Dengan demikian, analisis terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk memahami dinamika kebijakan pemerintah daerah dan prinsip masalah mursalah dapat diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli dari perspektif prinsip masalah mursalah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk kebijakan penanganan korban dan implementasi prinsip masalah mursalah dalam kebijakan publik. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana prinsip masalah mursalah dapat diterapkan dalam penanganan kecelakaan transportasi umum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerapan prinsip ini dalam kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks penerapan prinsip masalah mursalah dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Masalah kecelakaan transportasi umum bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Setiap tahunnya, ribuan nyawa melayang dan banyak lagi yang mengalami cedera serius akibat kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Sebagai penyedia layanan transportasi publik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan keselamatan penumpangnya. Namun, tanggung jawab ini tidak hanya berhenti pada pencegahan kecelakaan saja, tetapi juga mencakup penanganan korban setelah kecelakaan terjadi. Di sinilah pentingnya penerapan prinsip masalah mursalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Penerapan prinsip masalah mursalah dalam penanganan korban kecelakaan juga memiliki implikasi yang luas bagi pengembangan kebijakan publik. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penanganan korban kecelakaan harus mencakup tidak hanya kompensasi finansial, tetapi juga dukungan medis dan

psikologis, serta upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penanganan korban kecelakaan transportasi umum. Dengan memahami prinsip masalah mursalah dapat diterapkan dalam kasus ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru bagi akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah, sehingga dapat mendorong pengembangan kajian lebih lanjut di bidang ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed* (normatif empiris) dengan analisis kasus (*case study*) untuk menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli dari perspektif masalah mursalah. Pendekatan ini menggabungkan kajian normatif dan empiris, sehingga memungkinkan penelitian ini untuk memanfaatkan data hukum yang ada serta data faktual dari kasus kecelakaan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan data empiris. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, serta Peraturan Daerah yang relevan terkait tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap kecelakaan transportasi umum. Selain itu, data empiris diambil dari kasus kecelakaan Bus Trans Metro Deli, termasuk laporan kecelakaan, data korban, serta tanggapan dan kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah terkait penanganan kasus tersebut (Arfa, 2018)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bahan hukum primer serta literatur yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan untuk memperoleh data empiris dari sumber-sumber terkait, seperti laporan resmi, wawancara dengan pihak berwenang, dan data korban kecelakaan (Ridwan, 2021) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *case approach* untuk menganalisis kasus kecelakaan Bus Trans Metro Deli guna mengidentifikasi masalah hukum yang muncul dan mengevaluasi bagaimana prinsip masalah mursalah dapat diterapkan dalam konteks tersebut, serta pendekatan *statute approach* untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya masalah mursalah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta hukum dan empiris yang ditemukan, serta metode normatif untuk mengevaluasi kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan prinsip masalah mursalah. Dalam analisis normatif, digunakan pendekatan hermeneutika hukum untuk memahami tujuan dan makna dari aturan-aturan hukum yang relevan, serta untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan umum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tanggung

jawab Pemerintah Daerah dalam menangani korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli berdasarkan prinsip masalah mursalah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih efektif dan berbasis pada keadilan sosial.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Korban Kecelakaan Bus Trans Metro Deli dalam Perspektif Masalah Mursalah**

Tanggung jawab hukum pemerintah daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal melindungi kepentingan masyarakat. Dalam kecelakaan Bus Trans Metro Deli, tanggung jawab hukum pemerintah daerah mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kecelakaan, penanganan korban, hingga pemberian kompensasi kepada korban dan keluarganya. Berdasarkan prinsip masalah mursalah, tanggung jawab ini tidak hanya berfokus pada aspek legal tetapi juga pada upaya mencapai kemaslahatan umum. Proses seperti evakuasi darurat, pertolongan pertama, dan pengurusan kompensasi oleh Jasa Raharja harus dipandang sebagai langkah yang sejalan dengan kehendak syara', yang menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan syarat masalah yang logis, bersifat umum, dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat luas. Secara umum, tanggung jawab hukum pemerintah daerah meliputi kewajiban untuk memenuhi hak-hak warga negara, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diambil tidak merugikan masyarakat. Dalam perspektif hukum, tanggung jawab bersifat pidana, perdata, atau administratif, tergantung pada jenis dan dampak pelanggaran yang terjadi.

Kasus kecelakaan Bus Trans Metro Deli merupakan implementasi tanggung jawab hukum pemerintah daerah diuji. Dalam analisis hukum terhadap kasus ini, perlu diperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk operator bus, dinas perhubungan kota, dan pemerintah daerah. Kedua, analisis penyebab kecelakaan, disebabkan oleh kelalaian, kesalahan teknis, atau faktor lain yang dapat dihindari. Ketiga, penilaian terhadap tindakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam menanggapi kecelakaan tersebut, seperti langkah-langkah pertolongan pertama, evakuasi, dan perawatan korban (Wibowo, 2016)

Bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan bus Trans Metro Deli dapat dianalisis menggunakan syarat-syarat *masalah mursalah*. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan korban melalui langkah-langkah seperti pemberian kompensasi yang memadai, penyediaan layanan kesehatan darurat, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ini memenuhi syarat pertama, yaitu kebutuhan pokok (*dharuriyah*), karena langkah tersebut ditujukan untuk menjaga nyawa dan harta, dua komponen penting dalam *maqasid syariah*. Nyawa manusia harus dilindungi secara mutlak, dan langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi mudarat yang mungkin dialami korban maupun keluarga mereka (MISRAN, 2024)

Tanggung jawab pemerintah daerah juga memenuhi syarat kedua, yaitu

kemaslahatan yang pasti (*qath'iy*), karena tindakan tersebut secara langsung memberikan dampak positif yang nyata terhadap kehidupan korban. Sebagai contoh, pemberian kompensasi yang cepat dan layanan medis yang memadai terbukti mengurangi penderitaan korban secara fisik maupun finansial, bantuan dalam pengurusan Jasa Raharja merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakatnya. Proses ini mencerminkan keadilan sosial dan sejalan dengan prinsip masalah mursalah karena mengatasi dampak finansial yang dialami korban. Bantuan tersebut harus dirancang agar transparan dan mudah diakses, memenuhi kriteria umum (*'am*) dan kepastian manfaat (*qath'iy*). Syarat ketiga, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum (*'am*), juga terpenuhi karena kebijakan ini berlaku tanpa memandang status sosial, agama, atau suku, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah ini selaras dengan tujuan hukum Islam untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu sangat ditekankan. Pemerintah daerah wajib memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini mencakup penyediaan layanan medis yang memadai, bantuan psikologis, dan kompensasi yang layak bagi korban dan keluarga (Shafira, 2024). Selain itu, pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab atas setiap kelalaian yang terjadi, baik dari segi pemeliharaan kendaraan, pelatihan pengemudi, maupun pengawasan operasional. Hukum ekonomi syariah memberikan panduan yang komprehensif mengenai tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penanganan kecelakaan transportasi. Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah prinsip masalah mursalah yang menekankan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus mengedepankan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

Peraturan hukum ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan terhadap hak-hak individu (*haq al-fard*) (Aslami, 2023). Dalam kasus kecelakaan Bus Trans Metro Deli, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, prinsip tanggung jawab sosial (*al-takaful*) dalam hukum ekonomi syariah juga harus diterapkan. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa semua kebutuhan korban terpenuhi. Hal ini mencakup penyediaan bantuan medis, dukungan psikologis, serta bantuan finansial untuk menutupi biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya.

Prinsip masalah mursalah merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum syariah yang menekankan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli, penerapan prinsip ini sangat relevan. Masalah mursalah berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan (Qorib, 2016). Pertama, pencegahan kecelakaan, pemerintah daerah harus mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk memastikan keselamatan transportasi umum. Hal ini termasuk pemeliharaan berkala terhadap armada bus, pelatihan dan sertifikasi bagi pengemudi, serta

pengawasan ketat terhadap operasional transportasi. Penerapan teknologi canggih seperti sistem pemantauan GPS dan kamera pengawas juga dapat membantu dalam mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan.

Kedua, penanganan korban dalam prinsip masalah mursalah menuntut pemerintah daerah untuk menyediakan layanan medis yang cepat dan efisien. Hal ini mencakup evakuasi, penyediaan perawatan medis darurat, dan dukungan psikologis bagi korban dan keluarga. Pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan lainnya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan yang terbaik. Ketiga, kompensasi dalam prinsip masalah mursalah menuntut adanya keadilan dan keseimbangan dalam pemberian kompensasi kepada korban. Pemerintah daerah harus menetapkan mekanisme kompensasi yang transparan dan adil, serta memastikan bahwa semua korban mendapatkan hak tanpa diskriminasi. Kompensasi ini harus mencakup biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, serta kerugian lainnya yang diderita oleh korban. Keempat, evaluasi dan perbaikan kebijakan, prinsip masalah mursalah mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu relevan dan efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, serta bersedia melakukan perubahan jika diperlukan.

Penerapan prinsip masalah mursalah dalam tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli menuntut adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan kesejahteraan (Johan, 2023) Pemerintah daerah harus selalu mengutamakan kepentingan umum dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, serta memastikan bahwa setiap korban mendapatkan hak secara adil dan merata. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip masalah mursalah juga memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan korban terpenuhi, serta untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang diambil. Pemerintah daerah harus selalu siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta bersedia mendengarkan dan menerima masukan dari masyarakat.

Prinsip masalah mursalah memberikan dasar penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu mendahulukan kepentingan umum. Salah satu penerapan nyata prinsip ini dapat dilihat pada tanggung jawab pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan transportasi umum, seperti Bus Trans Metro Deli. Kehendak syara' menggariskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi nyawa dan harta masyarakat, terutama melalui fasilitas publik. Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah mencakup pelaksanaan prosedur evakuasi, pertolongan pertama, hingga pemberian kompensasi secara adil dan merata.

Proses evakuasi dan pertolongan pertama menjadi elemen mendasar dalam menjaga kebutuhan pokok (dharuriyah). Langkah ini sejalan dengan maqasid syariah yang mengutamakan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Melalui pengadaan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang efektif dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah dapat memastikan respons cepat dalam situasi darurat. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem pelacakan GPS atau pusat kendali lapangan

dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penanganan korban. Upaya ini penting untuk mengurangi dampak negatif kecelakaan dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hak mereka dilindungi.

Penyediaan kompensasi yang transparan dan mudah diakses merupakan bagian dari pemenuhan prinsip qath'iy (kepastian manfaat). Kompensasi yang diberikan mencakup pembiayaan layanan medis, dukungan rehabilitasi, hingga santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia. Pemerintah dapat menerapkan mekanisme berbasis daring maupun manual untuk memastikan semua korban mendapatkan akses yang setara. Prosedur yang jelas dan tanpa diskriminasi ini menggambarkan implementasi masalah mursalah yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak individu.

Kebijakan pemerintah dalam menangani korban kecelakaan harus bersifat inklusif. Fasilitas transportasi umum digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mengakomodasi kebutuhan mereka. Dengan memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan bersifat menyeluruh, pemerintah dapat memastikan bahwa kemaslahatan yang dihasilkan berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Rasionalitas kebijakan ini juga mendukung tujuan syariat Islam dalam menciptakan kesejahteraan dan mencegah kerugian yang lebih besar. Evakuasi yang tepat waktu, dukungan medis yang komprehensif, dan sistem kompensasi yang memadai mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum pemerintah. Langkah-langkah ini juga sesuai dengan undang-undang nasional yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat modern. Studi kasus dari daerah lain yang berhasil menerapkan kebijakan serupa dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat argumen ini.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli harus selalu berorientasi pada prinsip masalah mursalah yang menekankan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus selalu mengutamakan kepentingan umum dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, serta memastikan bahwa setiap korban mendapatkan hak secara adil dan merata. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Korban Kecelakaan Bus Trans Metro Deli Dari Perspektif Masalah Mursalah**

Penerapan tanggung jawab pemerintah terhadap korban kecelakaan transportasi umum seperti Bus Trans Metro Deli harus didasarkan pada prinsip masalah mursalah. Hal ini melibatkan dua aspek utama, yaitu: pertama, berjalan dengan kehendak syara', dan kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Penetapan tanggung jawab ini mengacu pada maqasid syariah yang menekankan perlindungan nyawa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-maal). Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban syar'i untuk melindungi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas publik, terutama dalam situasi kecelakaan.

Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat didasarkan pada hubungan syariah yang jelas. Kehendak syara' menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas wajib memastikan keselamatan dan keamanan bagi rakyatnya. Perlindungan terhadap korban kecelakaan menjadi manifestasi nyata

dari maqasid syariah dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, bantuan kompensasi oleh lembaga seperti Jasa Raharja mencerminkan kehadiran negara dalam mengurangi penderitaan yang diakibatkan kecelakaan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Aspek rasionalitas juga mendukung kebijakan ini. Secara logis, setiap individu yang mengalami kecelakaan membutuhkan pertolongan pertama, evakuasi, dan bantuan finansial untuk memastikan pemulihan fisik maupun sosial. Penanganan yang cepat dan terorganisir memberikan manfaat langsung, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat pengguna fasilitas transportasi umum lainnya. Kepentingan umum (masalah 'ammah) menjadi alasan utama mengapa perlindungan ini penting untuk diterapkan.

Karena transportasi umum adalah fasilitas publik yang dirancang untuk melayani masyarakat luas, perlindungan terhadap penggunaanya harus dianggap sebagai tanggung jawab kolektif yang diatur oleh pemerintah. Penyediaan layanan seperti evakuasi darurat dan pemberian kompensasi tidak hanya bersifat praktis tetapi juga mencerminkan kebijakan yang selaras dengan syariat Islam. Dengan memenuhi kebutuhan mendasar seperti ini, pemerintah tidak hanya melaksanakan mandat hukum tetapi juga memastikan bahwa kemaslahatan publik tetap menjadi prioritas.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli merupakan cerminan dari tanggung jawab dan komitmen pemerintah untuk melindungi warganya. Kebijakan ini mencakup pencegahan kecelakaan melalui peningkatan kualitas pelatihan pengemudi, penanganan darurat dengan prosedur evakuasi dan pertolongan pertama yang berbasis prinsip masalah mursalah, serta pemberian kompensasi yang adil dan transparan kepada korban. Semua langkah ini harus dirancang untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, sesuai dengan maqasid syariah yang memprioritaskan perlindungan nyawa dan harta. Dalam kasus kecelakaan, Pemerintah Daerah harus menunjukkan respons yang cepat dan efektif untuk mengurangi dampak negatif yang dialami oleh korban. Kebijakan ini harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepentingan umum (masalah mursalah), dan keterbukaan.

Pemerintah Daerah Kota Medan, diharapkan memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang jelas untuk menangani insiden kecelakaan seperti yang melibatkan Bus Trans Metro Deli. SOP ini harus mencakup langkah-langkah evakuasi, penyediaan layanan medis darurat, serta mekanisme pemberian bantuan dan kompensasi kepada korban dan keluarga. Kebijakan tersebut juga harus mencakup pelatihan dan kesiapan petugas lapangan untuk merespons situasi darurat secara efisien. Analisis kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dan bantuan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip masalah mursalah yang menekankan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangani korban kecelakaan sangat penting untuk diperhatikan. Regulasi merupakan dasar hukum yang mengatur tindakan dan respons pemerintah dalam situasi darurat. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa regulasi yang ada sudah mencakup semua aspek penanganan kecelakaan dan perlindungan korban. Hal ini termasuk peraturan mengenai keselamatan transportasi, standar operasional bus, dan tanggung jawab operator bus (Eviany, 2023). Anggaran juga merupakan faktor krusial. Pemerintah Daerah harus memiliki anggaran yang memadai untuk

mendukung operasional layanan darurat dan kompensasi bagi korban kecelakaan. Anggaran ini harus mencakup biaya operasional harian, pemeliharaan infrastruktur, pelatihan petugas, serta dana darurat untuk situasi tak terduga. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat penting agar pemerintah dapat memberikan respons cepat dan tepat waktu.

Sumber daya manusia (SDM) adalah elemen lain yang tak kalah penting. Petugas yang terlibat dalam penanganan kecelakaan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Pelatihan berkala dan pengembangan kapasitas SDM diperlukan untuk memastikan bahwa petugas mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah Daerah juga harus memastikan bahwa jumlah petugas yang tersedia cukup untuk menangani berbagai situasi darurat yang mungkin terjadi.

Faktor eksternal juga memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Masyarakat memainkan peran penting dalam proses penanganan kecelakaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam program keselamatan dan kesiapsiagaan darurat dapat membantu mengurangi risiko dan dampak kecelakaan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur keselamatan dan respons darurat sangat diperlukan.<sup>17</sup> Media massa juga memiliki peran yang signifikan. Media dapat membantu menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menangani kecelakaan. Pelaporan yang akurat dan bertanggung jawab dari media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta mempengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Namun, media juga harus berhati-hati agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat.

Syarat *masalah mursalah* dapat pula digunakan untuk meninjau Faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan korban kecelakaan bus Trans Metro Deli, seperti kondisi kendaraan, pelatihan pengemudi, dan kualitas infrastruktur jalan. Syarat pertama, bahwa kemaslahatan harus bersifat logis (*ma'qulat*), tercermin dari upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas pelatihan pengemudi. Misalnya, pelatihan yang terstruktur dan pengawasan ketat terhadap pengemudi bus logis untuk diterapkan karena relevan dalam menurunkan risiko kecelakaan.

Syarat kedua, yaitu memelihara kebutuhan prinsipil, terlihat pada kebijakan yang bertujuan menjaga keselamatan pengguna transportasi umum, yang merupakan bagian dari *dharuriyah* dalam *maqasid syariah*. Infrastruktur jalan yang memadai dan armada bus yang layak merupakan faktor utama untuk memastikan keselamatan ini. Syarat ketiga, bahwa kebijakan harus berlaku secara umum, juga terpenuhi karena kebijakan ini ditujukan untuk memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada transportasi umum sebagai sarana mobilitas utama. Dalam *masalah mursalah*, kebijakan pemerintah daerah merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh syariat Islam.

Lembaga non-pemerintah (LSM) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat menjadi mitra penting bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan korban kecelakaan. LSM dan OMS seringkali memiliki keahlian, sumber daya, dan jaringan yang dapat mendukung program pemerintah. Kolaborasi dengan LSM dan OMS dapat meningkatkan efektivitas penanganan kecelakaan serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memenuhi

kebutuhan korban. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa semua langkah yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip masalah mursal. Misalnya, dalam penyediaan kompensasi kepada korban kecelakaan, pemerintah harus memastikan bahwa kompensasi tersebut diberikan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan korban. Prosedur pengajuan kompensasi harus transparan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berhak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk kewajiban pemerintah dalam menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan memenuhi standar keselamatan. Pasal 138 dalam undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan angkutan umum yang memenuhi kriteria keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, Pasal 143 menyatakan bahwa penyelenggara angkutan umum wajib memastikan keselamatan penumpang sepanjang perjalanan, mulai dari saat naik hingga turun dari kendaraan (Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009). Dalam hal kecelakaan yang melibatkan Bus Trans Metro Deli, pemerintah daerah sebagai penyelenggara angkutan umum memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keselamatan penumpang dan memberikan kompensasi yang sesuai kepada korban. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal juga mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan medis dan evakuasi yang cepat dan efektif bagi korban kecelakaan. Rumah sakit dan kepolisian memiliki juga peran sangat krusial. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan menyusun laporan resmi yang diperlukan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai penyelenggara angkutan umum memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan keselamatan penumpang dan memberikan kompensasi yang layak kepada korban kecelakaan.

Penerapan masalah mursal dalam penanganan korban kecelakaan bus Trans Metro Deli dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkrit. Pertama, pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh bus yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Hal ini meliputi pengecekan rutin terhadap kondisi fisik bus, kelengkapan peralatan keselamatan, serta kualifikasi dan kesehatan pengemudi.

Dengan demikian, risiko terjadinya kecelakaan dapat diminimalisir dan keselamatan penumpang dapat terjamin. Dalam perspektif masalah mursal, semua langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum pemerintah daerah, tetapi juga untuk mencapai kemaslahatan umum (Mohammad Rusfi, 2024). Kecelakaan bus Trans Metro Deli bukan hanya masalah hukum dan teknis semata, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan dan sosial. Untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan keselamatan angkutan umum. Pemerintah daerah dapat mengadakan forum diskusi atau pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan masukan, serta melibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan angkutan umum. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, kebijakan yang diambil akan lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dan harapan.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan bus Trans Metro Deli harus dilihat dari perspektif yang holistik, menggabungkan

aspek hukum dan prinsip masalah mursalah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam menyediakan angkutan umum yang aman dan nyaman. Sementara itu, penerapan masalah mursalah mengingatkan kita bahwa tujuan utama dari semua kebijakan dan tindakan adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih baik, memberikan perlindungan yang optimal bagi korban kecelakaan, dan menciptakan sistem angkutan umum yang lebih aman dan berkelanjutan.

Kebijakan pencegahan kecelakaan juga harus diperkuat, Pemerintah Daerah harus mengadopsi langkah-langkah yang proaktif untuk meningkatkan keselamatan transportasi, seperti peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penerapan standar keselamatan yang ketat untuk operator bus, serta edukasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai keselamatan berkendara. Penerapan masalah mursalah juga menuntut Pemerintah Daerah untuk terus memantau dan mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi berkala dan keterbukaan terhadap umpan balik dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum.

Dalam kesimpulannya, kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, serta penerapan prinsip masalah mursalah. Regulasi yang kuat, anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta partisipasi aktif dari masyarakat, media, dan lembaga non-pemerintah merupakan elemen kunci yang harus diperhatikan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada korban kecelakaan serta mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan.

### **Implementasi Prinsip Masalah Mursalah dalam Prosedur Penanganan dan Kompensasi terhadap Korban Kecelakaan Bus Trans Metro Deli oleh Pemerintah Daerah**

Kecelakaan bus Trans Metro Deli yang sering terjadi di kota Medan telah menjadi isu serius yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perusahaan transportasi, dan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan berbagai masalah mendasar dalam sistem transportasi umum yang beroperasi di kota tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, telah tercatat sejumlah kecelakaan yang melibatkan bus Trans Metro Deli yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga korban jiwa dan luka-luka. Analisis umum mengenai penyebab kecelakaan ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan, termasuk kondisi kendaraan, perilaku pengemudi, serta infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Kondisi kendaraan bus Trans Metro Deli sering kali menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Banyak bus yang beroperasi dalam kondisi yang kurang layak dengan perawatan yang tidak memadai (Siti Khoiria, 2024) Kendaraan yang sudah tua, mesin yang sering bermasalah, rem yang tidak berfungsi dengan baik, serta kurangnya peralatan keselamatan seperti sabuk pengaman dan alat pemadam kebakaran, semuanya meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Pemeriksaan rutin terhadap kondisi bus sering kali diabaikan atau tidak dilakukan dengan standar yang seharusnya, sehingga bus yang tidak layak tetap beroperasi dan

mengancam keselamatan penumpang.

Perilaku pengemudi bus juga memainkan peran signifikan dalam kecelakaan yang terjadi. Banyak pengemudi yang mengemudikan bus dengan cara yang tidak aman, seperti melebihi batas kecepatan, mengemudi dalam keadaan lelah, atau bahkan di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Selain itu, kurangnya pelatihan dan sertifikasi yang memadai untuk pengemudi bus Trans Metro Deli juga menjadi masalah. Pengemudi yang tidak terlatih dengan baik cenderung tidak mampu menangani situasi darurat atau mengemudi dengan aman di jalan yang padat dan berbahaya.

Infrastruktur jalan yang kurang memadai di kota Medan juga berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan bus Trans Metro Deli. Jalan-jalan yang rusak, berlubang, atau tidak memiliki rambu-rambu lalu lintas yang jelas membuat pengemudi kesulitan untuk mengemudi dengan aman. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti jalur khusus untuk bus, halte yang aman dan nyaman, serta lampu lalu lintas yang berfungsi dengan baik, semuanya memperburuk situasi. Kondisi jalan yang buruk tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga memperlambat respon darurat ketika kecelakaan terjadi.

Manajemen operasional dari perusahaan transportasi yang mengelola bus Trans Metro Deli juga sering kali kurang efektif. Kurangnya koordinasi antara berbagai departemen, seperti perawatan kendaraan, jadwal operasional, dan pelatihan pengemudi, menyebabkan banyak celah yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Selain itu, tekanan untuk memenuhi target operasional dan keuntungan sering kali membuat perusahaan mengabaikan aspek keselamatan, seperti mengurangi waktu perawatan kendaraan atau mengabaikan pelatihan pengemudi.

Aspek regulasi dan pengawasan dari pemerintah daerah juga perlu diperhatikan. Meskipun ada peraturan yang mengatur keselamatan transportasi umum, implementasi dan pengawasan dari peraturan ini sering kali lemah. Pemerintah daerah sering kali kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap kondisi bus, perilaku pengemudi, dan infrastruktur jalan. Selain itu, kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi juga membuat banyak pihak merasa tidak ada konsekuensi serius dari mengabaikan aspek keselamatan. Dalam beberapa kasus, kecelakaan bus Trans Metro Deli telah menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi korban dan keluarganya. Banyak korban yang mengalami luka-luka serius yang memerlukan perawatan medis jangka panjang, sementara keluarga korban yang meninggal harus menghadapi kehilangan yang mendalam dan sering kali juga kesulitan finansial (Suci Ramadhani, 2017).

Dalam situasi ini, pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan transportasi, menjadi sangat penting untuk memberikan kompensasi yang layak dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kecelakaan yang melibatkan Bus Trans Metro Deli di Kota Medan, seperti yang terjadi pada 13 Februari 2024, di Jalan Sisingamangaraja, menjadi salah satu contoh konkret dari risiko yang dihadapi oleh pengguna transportasi umum. Dalam kecelakaan tersebut, seorang pengendara motor tewas setelah terlindas oleh bus, dengan luka parah di bagian kepala. Laporan dari kepolisian setempat, seperti yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polrestabes Medan, Kompol Andika Purba, menunjukkan bahwa pengemudi bus telah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut.<sup>22</sup> Proses ini mencerminkan bagaimana penegakan hukum dan prosedur penanganan kecelakaan harus

mengikuti prinsip masalah mursalah, yang berfokus pada perlindungan masyarakat, terutama dalam hal keselamatan transportasi umum.

Data kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, dengan total 6.465 kecelakaan pada tahun 2022, mengakibatkan 1.607 korban meninggal dunia dan 2.138 luka berat. Kerugian materi akibat kecelakaan ini mencapai Rp4.603,84 juta di Kota Medan saja, yang mempertegas urgensi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap angkutan umum seperti bus Trans Metro Deli. Setiap kecelakaan yang terjadi perlu ditangani dengan prosedur yang jelas dan terkoordinasi, mulai dari evakuasi hingga pemberian kompensasi yang sesuai, dengan mengedepankan prinsip masalah mursalah, yaitu untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat bagi korban kecelakaan.

Kasus lain yang juga menjadi sorotan adalah kecelakaan yang terjadi di jalan tol, di mana sebuah bus Trans Metro Deli menabrak kendaraan lain karena pengemudi kehilangan kendali akibat kecepatan yang terlalu tinggi. Kejadian ini menyebabkan kemacetan panjang dan kerugian materiil yang signifikan. Pengemudi bus tersebut kemudian diketahui tidak memiliki sertifikat pelatihan yang memadai dan memiliki catatan pelanggaran lalu lintas sebelumnya. Kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan dan pemerintah daerah terhadap kualifikasi dan perilaku pengemudi menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap standar keselamatan transportasi umum. Ini termasuk melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi bus, memastikan bahwa semua pengemudi memiliki sertifikat pelatihan yang memadai, serta memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan tidak aman. Selain itu, perusahaan transportasi harus lebih bertanggung jawab dalam mengelola operasional dengan mengutamakan keselamatan penumpang di atas keuntungan semata.

Masyarakat juga harus dilibatkan dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi umum. Edukasi mengenai pentingnya keselamatan dalam berkendara, baik bagi penumpang maupun pengemudi, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melaporkan kondisi bus yang tidak layak atau perilaku pengemudi yang berbahaya kepada pihak berwenang, sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan. Dalam jangka panjang, reformasi sistem transportasi umum yang lebih menyeluruh mungkin diperlukan. Ini bisa mencakup investasi dalam bus baru yang lebih aman dan nyaman, peningkatan pelatihan dan kesejahteraan pengemudi, serta pengembangan infrastruktur pendukung yang lebih baik.

Penerapan tanggung jawab pemerintah terhadap korban kecelakaan transportasi umum seperti Bus Trans Metro Deli harus didasarkan pada prinsip masalah mursalah. Hal ini melibatkan dua aspek utama, yaitu: pertama, berjalan dengan kehendak syara', dan kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Penetapan tanggung jawab ini mengacu pada maqasid syariah yang menekankan perlindungan nyawa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-maal). Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban syar'i untuk melindungi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas publik, terutama dalam situasi kecelakaan.

Proses pertolongan pertama dan evakuasi mencerminkan kehendak syara' karena tindakan ini mendukung prinsip perlindungan nyawa (hifz al-nafs).

Langkah ini menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko kematian atau cedera berat akibat kecelakaan. Evakuasi cepat dan efektif merupakan kebutuhan pokok (dharuriyah) yang tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada korban, tetapi juga memastikan kepastian layanan kepada masyarakat luas. Rasionalitas kebijakan ini juga dapat dipahami dari dampak nyatanya dalam menciptakan rasa aman bagi pengguna fasilitas publik.

Selain itu, tanggung jawab dalam proses pembantuan pengurusan kompensasi melalui Jasa Raharja juga sejalan dengan prinsip masalah mursalah. Pemberian kompensasi tidak hanya meringankan penderitaan finansial korban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi mereka pasca kecelakaan. Bantuan finansial ini memenuhi kehendak syara' karena berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan pengurangan beban korban. Kepentingannya bersifat umum ('ammah) karena diarahkan kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk pengguna fasilitas transportasi umum.

Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat didasarkan pada hubungan syariah yang jelas. Kehendak syara' menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas wajib memastikan keselamatan dan keamanan bagi rakyatnya. Perlindungan terhadap korban kecelakaan menjadi manifestasi nyata dari maqasid syariah dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, bantuan kompensasi oleh lembaga seperti Jasa Raharja mencerminkan kehadiran negara dalam mengurangi penderitaan yang diakibatkan kecelakaan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

Aspek rasionalitas juga mendukung kebijakan ini. Secara logis, setiap individu yang mengalami kecelakaan membutuhkan pertolongan pertama, evakuasi, dan bantuan finansial untuk memastikan pemulihan fisik maupun sosial. Penanganan yang cepat dan terorganisir memberikan manfaat langsung, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat pengguna fasilitas transportasi umum lainnya. Kepentingan umum (masalah 'ammah) menjadi alasan utama mengapa perlindungan ini penting untuk diterapkan. Karena transportasi umum adalah fasilitas publik yang dirancang untuk melayani masyarakat luas, perlindungan terhadap penggunaannya harus dianggap sebagai tanggung jawab kolektif yang diatur oleh pemerintah. Penyediaan layanan seperti evakuasi darurat dan pemberian kompensasi tidak hanya bersifat praktis tetapi juga mencerminkan kebijakan yang selaras dengan syariat Islam. Dengan memenuhi kebutuhan mendasar seperti ini, pemerintah tidak hanya melaksanakan mandat hukum tetapi juga memastikan bahwa kemaslahatan publik tetap menjadi prioritas.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan angka kecelakaan bus Trans Metro Deli dapat berkurang secara signifikan. Keberhasilan upaya ini tidak hanya akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi umum yang ada. Pada akhirnya, tujuan utama dari semua langkah ini adalah untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip masalah mursalah (kepentingan umum) berperan penting dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Prinsip ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian bagi masyarakat (Noranisa, 2023) Dalam kasus kecelakaan Bus Trans Metro Deli, penerapan prinsip masalah mursalah dalam prosedur penanganan dan kompensasi terhadap korban sangat relevan. Prosedur penanganan dan kompensasi terhadap korban kecelakaan Bus

Trans Metro Deli oleh pemerintah daerah menggambarkan prinsip masalah mursalah yang berfokus pada kemaslahatan umum. Prosedur ini tidak hanya memenuhi syarat dharuriyah (kebutuhan pokok) melalui evakuasi dan layanan medis darurat, tetapi juga menggambarkan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi nyawa dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai maqasid syariah (perlindungan jiwa) dengan memprioritaskan respons cepat dan layanan komprehensif. Selain itu, prosedur ini memenuhi prinsip kemaslahatan pasti (qath'iy) karena berdampak langsung pada pengurangan penderitaan fisik dan finansial korban.

Proses pertolongan pertama dan evakuasi tidak hanya merupakan kewajiban teknis tetapi juga bagian dari implementasi masalah mursalah. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah yang memprioritaskan perlindungan jiwa (hifz al-nafs). Pemerintah daerah harus memastikan adanya tim respons cepat yang siap siaga dan dilengkapi dengan sumber daya memadai untuk menangani korban kecelakaan. Langkah ini jelas memberikan dampak nyata dalam mengurangi risiko fatalitas dan memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik (Wahyuni, 2023). Dalam perspektif masalah mursalah, evakuasi cepat dan efektif adalah bentuk perlindungan terhadap nyawa manusia yang merupakan salah satu maqasid syariah (tujuan syariah) yang utama. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus berinvestasi dalam infrastruktur dan pelatihan yang diperlukan untuk memastikan evakuasi yang efisien dan aman.

Korban kecelakaan harus mendapatkan layanan medis yang komprehensif. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa rumah sakit dan pusat kesehatan memiliki kapasitas untuk menangani korban kecelakaan dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan tenaga medis yang terlatih, peralatan medis yang memadai, dan fasilitas untuk perawatan intensif jika diperlukan. Selain layanan medis, dukungan psikologis juga penting bagi korban kecelakaan. Trauma psikologis dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, sehingga layanan konseling dan dukungan psikologis harus disediakan. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga psikologis dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan tersebut.

Prosedur pemberian kompensasi kepada korban kecelakaan adalah bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah. Kompensasi ini bertujuan untuk membantu korban dan keluarga dalam menghadapi dampak finansial dari kecelakaan. Prosedur ini harus transparan, adil, dan efisien untuk memastikan bahwa korban menerima bantuan yang dibutuhkan tanpa penundaan yang tidak perlu (Claudia, 2024). Kriteria dan kelayakan korban untuk mendapatkan kompensasi harus ditetapkan secara jelas dan adil. Pemerintah Daerah harus menentukan kriteria berdasarkan tingkat cedera, kehilangan yang dialami, dan kebutuhan khusus korban. Proses penilaian ini harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan tim ahli untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Evaluasi dan monitoring adalah bagian penting dari implementasi prinsip masalah mursalah dalam prosedur penanganan dan kompensasi korban kecelakaan. Pemerintah Daerah harus melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Hal ini termasuk penilaian terhadap kecepatan respon, kualitas layanan medis, dan kepuasan korban terhadap kompensasi yang diberikan. Monitoring juga harus melibatkan umpan balik dari korban dan masyarakat untuk memahami pengalaman dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Pemerintah Daerah harus menggunakan informasi ini untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada

prosedur dan kebijakan yang ada. Studi kasus mengenai implementasi prosedur penanganan dan kompensasi korban kecelakaan bus Trans Metro Deli menunjukkan berbagai tingkat keberhasilan dan tantangan. Analisis terhadap beberapa kasus menunjukkan bahwa penerapan prinsip masalah mursalah telah berhasil meningkatkan kualitas penanganan korban dan mempercepat proses pemberian kompensasi. Namun, terdapat pula tantangan seperti koordinasi antar instansi yang perlu ditingkatkan dan penyediaan layanan psikologis yang masih perlu diperluas. Evaluasi kasus-kasus ini membantu Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa prinsip masalah mursalah tetap menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diambil.

Prosedur penanganan dan kompensasi terhadap korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli oleh pemerintah daerah mencerminkan implementasi prinsip masalah mursalah. Prosedur ini meliputi langkah-langkah seperti pertolongan pertama, evakuasi darurat, dan penyediaan layanan medis yang mendesak, yang semuanya sejalan dengan maqasid syariah (perlindungan jiwa). Penetapan tanggung jawab ini sesuai dengan kehendak syara' karena menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat, khususnya dalam transportasi umum yang dikelola pemerintah. Dengan prosedur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok (dharuriyah), memastikan manfaat nyata (qath'iy), dan berlaku bagi semua pihak tanpa diskriminasi ('am), kebijakan ini memenuhi semua syarat masalah mursalah. Syarat pertama, bahwa kemaslahatan harus terkait dengan kebutuhan pokok (*dharuriyah*), terlihat pada prosedur evakuasi dan pemberian layanan medis darurat kepada korban kecelakaan. Tindakan ini bertujuan langsung untuk melindungi nyawa dan kesehatan korban, dua aspek dasar dalam *maqasid syariah*. Selanjutnya, syarat kedua, yaitu kemaslahatan yang dapat diyakini kepastiannya, juga terpenuhi karena langkah-langkah ini terbukti efektif dalam mengurangi dampak fisik, psikologis, dan finansial bagi korban kecelakaan.

Prosedur ini juga memenuhi syarat ketiga, yaitu berlaku secara umum, karena sistem kompensasi dan bantuan medis yang diterapkan tidak mendiskriminasikan kelompok tertentu. Misalnya, pemerintah daerah menetapkan kriteria kompensasi berdasarkan tingkat kerugian dan kebutuhan korban, sehingga setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai. Selain itu, syarat keempat, bahwa kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nash *qath'i*, terwujud karena prosedur ini sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan nyawa, dan pemulihan hak yang menjadi inti dari syariat Islam. Dengan prosedur yang transparan, akuntabel, dan komprehensif, pemerintah daerah tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga melaksanakan nilai-nilai Islam melalui prinsip *masalah mursalah* yang aplikatif.

Implementasi prinsip masalah mursalah dalam prosedur penanganan dan kompensasi korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya penting untuk melindungi dan memulihkan korban dengan adil dan efektif. Melalui prosedur yang transparan, respons cepat, dan layanan yang komprehensif, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan bahwa prinsip masalah mursalah diterapkan secara optimal. Evaluasi berkelanjutan dan studi kasus yang mendalam juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan perspektif masalah mursalah, pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap korban kecelakaan Bus Trans Metro Deli menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan umum dalam kebijakan publik. Setiap langkah yang diambil, mulai dari evakuasi hingga pemberian kompensasi, harus memenuhi syarat masalah, yakni sesuai kehendak syara', tidak bertentangan dengan syariat, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah, sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan transportasi publik, memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan pengguna fasilitas umum, yang secara langsung mencerminkan kepentingan umum (masalah mursalah). Hal ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah daerah, terutama Dinas Perhubungan Kota Medan dan Gubernur Sumatera Utara, memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis tetapi juga memenuhi prinsip masalah mursalah. Penyediaan infrastruktur yang aman, regulasi ketat, dan penanganan langsung terhadap korban mencerminkan usaha pemerintah untuk mengutamakan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Tindakan ini harus memastikan tercapainya keseimbangan antara keadilan sosial dan pemenuhan hak masyarakat, khususnya korban kecelakaan, dalam bingkai maqasid syariah. Prinsip masalah mursalah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, tindakan seperti evakuasi korban kecelakaan, pemberian layanan medis darurat, dan mekanisme kompensasi tidak hanya memenuhi prinsip keadilan sosial tetapi juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah yang sejalan dengan kehendak syara'. Kebijakan ini berorientasi pada kepentingan umum (masalah 'ammah) dan menjamin kemanfaatan yang nyata (qath'iy) bagi seluruh masyarakat. Dalam hal kecelakaan transportasi umum, penerapan prinsip ini mencakup tanggung jawab hukum pemerintah, kebijakan penanganan korban, dan mekanisme kompensasi. Tindakan yang diambil harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum dan pencegahan kerugian.

Penanganan korban kecelakaan oleh pemerintah daerah mencakup berbagai tahapan, dari evakuasi dan pertolongan pertama hingga pemberian kompensasi. Setiap tahapan ini harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip masalah mursalah untuk memastikan manfaat yang diperoleh korban dan masyarakat lebih besar daripada kerugiannya. Penerapan prinsip masalah mursalah juga memiliki implikasi luas bagi pengembangan kebijakan publik. Pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dukungan medis, psikologis, serta upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah harus terus dievaluasi dan diperbaiki untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam melindungi kepentingan masyarakat.

## REFERENSI

- Ambarwati, A. (2021). *Perilaku dan teori organisasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Aslami, N., Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2023). *Pengukuran Kinerja Islami*

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumut Dengan Menggunakan Pendekatan Masalah Performa (MaP). *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Claudia, J., & Lie, G. (2024). Tanggung Jawab Pengusaha Atas Perawatan Kesehatan Dan Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap pekerja/buruh (studi kasus PT. Sims, Grogot, Kalimantan Timur). *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol. 4, No. 2.
- Eviany, E., & Sutiyo, S. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Goklas Wisely, “Pemotor Tewas Terlindas Bus Metro Deli di Medan, Sopir Diamankan Polisi”, *detikSumut* (13 February 2024), online: <<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7191498/pemotor-tewas-terlindas-bus-metro-deli-di-medan-sopir-diamankan-polisi>>.
- Hadi, A., & Peristiwa, H. (2019). Konsep Al Masalah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al Ahkam*, Vol. 15, No. 2.
- Khoiria, Siti, “Kebijakan Trans Metro Deli sebagai Upaya Meningkatkan Layanan Transportasi Umum di Kota Medan” (2024) 6:4 joe 19430–19437.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Menuju Transportasi Perkotaan yang Ramah dan Nyaman*, 2021. <https://dephub.go.id/post/read/menuju-transportasi-perkotaan-yang-ramah-dan-nyaman> diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Noranisa, N., & Asmi, N. (2023). elevating leadership: Menggali Urgensi Jabatan Wakil Kepala Daerah Dari Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 3, No. 2.
- Polda Sumatera Utara Direktorat Lalu Lintas, *Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas menurut Korban dan Kabupaten/Kota, 2022* (2023).
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam. *Journal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, Vol. 2, No. 1.
- Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”.
- Shafira, S. D. S., Hasan, A., Azfa, N., & Nurainuniisa, S. (2024). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Simanjuntak, Johan Oberlyn, Nurvita I M Simanjuntak & Yosse J L Panjaitan, “Analisis Kinerja Bus Trans Metro Deli Rute K5m Tembung-Lapangan Merdeka” (2023) 2:2.
- Siregar, Suci Ramadhani & Transportasi Trisakti, “Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan” (2017) 04:02.
- Sultan, M. (2019). *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?*. uwais inspirasi indonesia.
- Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, LN. 2009/ No. 96, TLN NO. 5025, LL Setneg : 143 Hlm.
- Wahyuni, R., Rahman, A., & Putri, R. N. (2023). *Mitigasi & Psikologi Kebencanaan*. Suluah Kato Khatulistiwa.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar

Grafika (Bumi Aksara).

Wibowo, E. S., Firdaus, F., & Hasanah, U. (2016). *Tanggung Jawab Pengusaha Bus Trans Metro Pekanbaru (Tmp) terhadap Kerugian Pihak Ketiga yang Menjadi Korban Kecelakaan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Doctoral dissertation, Riau University).